



# RINGKASAN

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### KABUPATEN BINTAN

#### TAHUN 2021

#### I. CAPAIAN KINERJA MAKRO DAERAH

Capaian kinerja makro merupakan ukuran didalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.

Adapun perkembangan capaian kinerja makro daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,13	74,57	0,59%
2	Angka Kemiskinan	6,36	6,42	0,94%
3	Angka Pengangguran	8,86	8,62	2,71%
4	Pertumbuhan Ekonomi	-4,28	0,23	105,37%
5	Pendapatan Per Kapita	86,49 Juta	86,49 Juta	0%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,31	0,27	12,90%

Sumber: Badan Pusat Statistik Bintan, Tahun 2022

##### a. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Bintan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74.57 dari sebelumnya 74,13 di tahun 2020 serta tergolong dalam kategori tinggi. Tren positif ini terus dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Bintan menjaga selama lebih dari 8 (Delapan) tahun berturut-turut berdasarkan pertumbuhan capaian IPM.



# RLPPD

## TAHUN 2021

RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Pencapaian pembangunan manusia ini dilakukan dengan strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi sesuai dengan agenda “sejahtera” dan didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan di masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

b. Angka Kemiskinan

Kabupaten Bintan pada posisi terbaik kedua dengan 6,42 % dalam menekan lonjakan persentase penduduk miskin diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Terobosan menekan laju penduduk yang terdampak agar tidak masuk ke dalam lingkaran kemiskinan adalah dengan usaha pemulihan melalui beragam kebijakan maupun bantuan sosial serta asistensi ekonomi kerakyatan kepada masyarakat.

Adanya jarring pengaman sosial (Social Safety Net) sebagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial selama pandemi Covid-19 meringankan beban rumah tangga dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

c. Angka Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 mengalami perkembangan positif dibandingkan posisi tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode 2021 yang menurun menjadi 8,62 %. Seiring dengan hal tersebut posisi penduduk usia kerja di Kabupaten Bintan terdapat 69.950 jiwa atau 91,38 % merupakan kategori bekerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah ditinjau dari sisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan menunjukkan perkembangan dengan Bangkit (*Rebound*) ditengah kondisi gejolak ekonomi regional dan nasional. Sinyalemen positif tersebut ditunjukkan dengan LPE mampu tumbuh hingga 4.43 % pada tahun 2021 menyentuh 0.23 %. Upaya pemerintah melalui kebangkitan kondisi ekonomi sejalan dengan usaha recovery dan menunukkan rebound dari keterpurukan pada tahun 2020 di -4.20 %.

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita berguna untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat dari suatu wilayah serta dapat berfungsi untuk mengetahui perkembangan pembangunan. Pada tahun 2021 Pendapatan Perkapita Kabupaten Bintan masih diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 86,49 Juta. Ini dipengaruhi masih belum Kembali sepenuhnya sector-sektor usaha terbuka 100 % yang bersinggungan dengan potensi pendapatan asli masyarakat daerah di Kabupaten Bintan.

f. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Potret gini ratio di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif, hal ini terlihat dari menurunnya



ketimpangan dari 0,31 pada tahun 2020 menjadi 0,27 di tahun 2021. Pada dasarnya Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Dari hasil tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bintan berkomitmen dengan agenda pemerintahan yang Pro Job, Pro Poor dan Pro Growth.

## II. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2021
1.	Pendidikan 4 Indikator	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	58,27%
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	83,41%
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72,98%
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	76%
2.	Kesehatan 14 Indikator	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,14%
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,88%
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,38%
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,09%
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,26%
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,52%
		12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	43,02%
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70,46%
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,33%
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%



**RLPPD**  
TAHUN 2021

**RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2021
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	89,36%
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 Indikator	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	96,49%
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	25,31%
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	73,03%
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,65%
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%
		25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	99,10%
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 Indikator	28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	92,86%
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	3,77%
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5%
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	78,61%
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 7 Indikator	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	168.754
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	168.754
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14.366
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%



**RLPPD**  
TAHUN 2021

**RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

No	Urusan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja LPPD 2021
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15
6.	Sosial 2 Indikator	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	99,20%
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

### III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Kabupaten Bintan pada selama kurun waktu 2 tahun terakhir memiliki skor >3 dengan status prestasi “Tinggi”. Hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bintan tersebut menempatkan daerah ini pada posisi terbaik ke-2 se-Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pelaporan tahun 2020.
- Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2020 didapatkan hasil opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 76/LHP/XVIII.TJP/05/2021 tanggal 03 Mei 2021, oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020. Selama 10 Tahun berturut-turut Kabupaten Bintan mampu mempertahankan prestasi tersebut, Capaian opini WTP merupakan bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada kondisi luar biasa dan tidak terduga sepanjang tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.



#### IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

- Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.106.147.234.756,92
- 73 % Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2021 ditopang oleh Pendapatan Transfer (dana Perimbangan).
- Komponen PAD menyumbang porsi 18 % dari total pendapatan daerah sekaligus tumbuh 2,29 % pada tahun anggaran 2021.



- Secara umum adapun gambaran perkembangan daripada kondisi realisasi Belanja daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. Rp 1.116.857.494.607,31,- atau 91,16 % dari perencanaan awal belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.225.133.748.261,68,-.
- Adapun untuk Anggaran Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp 940.086.490.634,68 dan terealisasi sebesar Rp 853.483.115.172,98 atau 90,78 %.
- Sedangkan untuk realisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp 149.418.347.825,33 atau 90 % dari anggaran sebesar Rp. 166.054.936.680,00.
- Selanjutnya, untuk realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp 5.674.118.343,00 atau 55,68% dari anggaran sebesar Rp. 10.189.062.247,00.
- Untuk Belanja Transfer di Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 108.803.258.700,00 dengan realisasi mencapai Rp. 108.281.913.266,00 atau sebesar 99,52 %.



## V. REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

### a. Pendapatan Daerah

Stabilitas pendapatan daerah Kabupaten Bintang sepanjang tahun 2021 dari sisi optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemandirian daerah ditengah arus dampak pandemi serta konstelasi kebijakan pemerintah pusat berkenaan pembatasan pergerakan masyarakat dan eskalasi global pada sektor-sektor pendukung potensial pendapatan daerah Kabupaten Bintang.

Pada Kebijakan Umum Anggaran tahun 2021 Kabupaten Bintang untuk target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.077.644.954.892,00,- dan untuk realisasi pada tahun ini meningkat hingga Rp. 1.106.147.234.756,92,- atau 102,64 %.

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	PENDAPATAN	1.077.644.954.892,00	1.106.147.234.756,92
1.1	Pendapatan Asli Daerah	199.884.059.562,00	195.902.264.544,92
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	8.567.875.000,00	8.220.915.191,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	36.553.168.343,00	46.210.438.123,15
1.2	Pendapatan Transfer	848.503.369.330,00	870.158.338.817,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	694.628.830.576,00	721.653.963.814,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	85.128.175.000,00	84.606.327.200,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	-	-
1.3	Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang (Unaudited)



# RLPPD TAHUN 2021

**RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
Pemerintahan Daerah  
KABUPATEN BINTAN**

## b. Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kinerja capaian realisasi belanja daerah kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	BELANJA DAERAH	1.225.133.748.261,68	1.116.857.494.607,31
1.1	BELANJA OPERASI	940.086.490.634,68	853.483.115.172,98
1.1.1	Belanja Pegawai	505.700.609.688,68	476.580.586.274,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	381.489.167.191,00	327.401.939.670,98
1.1.5	Belanja Hibah	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00
1.2	BELANJA MODAL	166.054.936.680,00	149.418.347.825,33
1.2.1	Belanja Modal Tanah	6.416.283.204,00	994.839.115,00
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.327.608.206,00	1.954.288.040,00
1.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.000.000,00	2.970.000,00
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00
1.4	BELANJA TRANSFER	108.803.258.700,00	108.281.913.266,00
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.285.366.000,00	15.285.365.800,00
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	93.517.892.700,00	92.996.547.466,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Unaudited)





Pada tahun anggaran 2021 realisasi dari setiap komposisi pembentuk belanja daerah adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi Rp. 853.483.115.172,98,- yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. Selanjutnya adalah Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 149.418.347.825,33,- yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta, Belanja Modal Aset Lainnya. Komponen Belanja Tidak Terduda terealisasi sebesar Rp. 5.674.118.343,00,- Transfer di tahun anggaran 2021 terealisasi

### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.088.793.369,68	149.093.793.369,68
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.088.793.369,68	149.088.793.369,68
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.000.000,00
1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
1.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		147.488.793.369,68	147.493.793.369,68
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	136.783.533.519,29

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Unaudited)

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tahun 2021 kemudian berdasarkan realisasi Pembiayaan Netto TA 2021 sebesar Rp. 147.493.793.369,68 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 147.493.793.369,68. Pembiayaan Netto tersebut pada dasarnya jumlahnya menurun dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp 204.170.204.134,47 atau 27,76%.



**RLPPD**  
TAHUN 2021

**RINGKASAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
Pemerintahan Daerah  
KABUPATEN BINTAN**

Sedangkan untuk realisasi Penggunaan SILPA APBD Tahun 2020 sebesar Rp 149.088.793.369,68 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 149.088.793.369,68 dan pengembalian pokok dana bergulir sebesar meningkat sebesar Rp. 5.000.000,00,- dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp2.250.000,00. Selanjutnya dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp206.172.453.684,47 atau menurun sebesar Rp 57.081.410.314,79 atau 27,69%.

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bintang melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 1.600.000.000,00 lebih rendah dari tahun sebelumnya di 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00,-.

## VI. INOVASI DAERAH

Kabupaten Bintang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut pada ajang Innovative Government Award (IGA) dengan predikat Kabupaten Terinovatif Nasional Kategori Daerah Perbatasan.

Kabupaten Bintang dalam Indeks Rata-Rata Inovasi Nasional masuk kategori predikat "Sangat Inovatif". Predikat "Sangat Inovatif" diberikan kepada 126 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kabupaten Bintang berada pada ranking 65 secara nasional serta termasuk didalam 54 pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang masuk dalam Klaster Daerah Perbatasan. Kabupaten Bintang menempati posisi 38 dari 416 kabupaten Se-Indonesia serta termasuk 79 Kabupaten dengan Predikat Sangat Inovatif. Berikut adalah infografis pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintang tahun 2020-2021:

